



## ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM BELA BELI KULON PROGO TAHUN 2017-2018

Bobby Salihin Handoko<sup>1</sup>  
Muhammad Eko Atmojo<sup>2</sup>

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
Corresponding Author: [muhammadekoatmojo@yahoo.com](mailto:muhammadekoatmojo@yahoo.com)

### Article Info

**Keyword:**  
Keyword 1;  
Policy  
Keyword 2;  
Community  
participation.  
Keyword 3;  
SMEs Products.  
Keyword 4;  
Community  
Empowerment.

**Abstract:** *The Government of Kulon Progo has the policy to revive the economy of Indonesia. One way to revive the economy of Indonesia in Kulon Progo with the Program BelaBeli Kulon Progo. This policy has a very positive impact on the people of Kulon Progo, one of them with the cooperation between the local government and modern stores. This research aims to see the participation of people in the Kulon Progo Regency to succeed in the policy of martial buy Kulon Progo. The method used in this research is a qualitative method, using the data collection techniques of interviews and documentation. Based on the results of the study, the cooperation of Kulon Progo Regency carries an extraordinary economic impact for the community, because local products are required to enter the modern store. This policy eventually grew the participation of the people of the Kulon Progo Regency to move the economy in the area. With the policy of community empowerment done by the local government indirectly succeeded, this can be seen from the number of SMEs products that have entered into modern stores in Kulon Progo Regency, at least the local products are already competing with national products. In addition to that point of inactivity and opportunity is also one of the indicators that are very influential in the implementation of the policy of martial buy Kulon Progo.*

**Kata Kunci:**  
Kata Kunci 1;  
Kebijakan.  
Kata Kunci 2;  
Partisipasi  
Masyarakat.  
Kata Kunci 3;  
Produk UMKM.  
Kata Kunci 4;  
Pemberdayaan  
Masyarakat.

**Abstrak:** *Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kebijakan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mensukseskan kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelilitan didapat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membawa dampak perekonomian yang sangat luar biasa bagi masyarakat, karena produk-produk lokal diwajibkan untuk masuk ke dalam toko modern tersebut. Kebijakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung berhasil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk UMKM yang sudah masuk ke dalam toko modern di Kabupaten Kulon Progo, setidaknya produk lokal tersebut sudah bersaing dengan produk nasional. Selain itu poin keaktifan dan kesempatan juga merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Bela Beli Kulon Progo.*

**Article History:** Received 29-Februari-2020, Revised 20-Maret-2020, Accepted 19-April-2020

## INTRODUCTION

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran dan sebuah kondisi yang tidak berdaya. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya (Kurniati, 2013). Sehingga dibutuhkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Corynta, 2011).

Sehingga, masyarakat harus mampu berperilaku responsif guna tercapainya fungsi dari pemberdayaan. Dalam hal ini tentu responsifitas masyarakat dapat dilihat berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pengertian partisipasi sendiri sangat beragam. Dalam konteks ini, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak lagi menjadi objek dari pembangunan saja tetapi menjadi subjek pembangunan, dimana masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang dan menyelesaikan masalahnya (Uceng, 2019).

Tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat menjadi dasar modal utama pada setiap perencanaan kebijakan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh peran *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tidak sedikit program pemerintah yang menggunakan pola pendekatan partisipatif, namun dalam prakteknya bukan bentuk partisipasi tetapi lebih kepada mobilisasi dan juga prosesnya bukan *bottom-up* tetapi *top down*. Seringkali masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan dalih mengatasnamakan partisipasi (Mustanir, 2018).

Sehingga didorong dengan perkembangan era saat ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi faktor fundamental dalam pengurangan kemiskinan. Isu yang memang paling menonjol dalam persoalan kemiskinan adalah rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, seseorang akan semakin terjebak didalam lingkaran kemiskinan (*proverty trap*) (Nurmanaf, 2003).

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sebuah pendekatan yang bisa meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan dorongan kemandirian dan konsep utama dari pemberdayaan tersebut dapat terwujud. Banyak program dengan konsep pemberdayaan sudah diimplementasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan salah satunya adalah dapat dilakukan melalui sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk kemudian meluncurkan program guna mengembangkan produk lokal. Program tersebut disebut dengan program “Bela Beli Kulon Progo”.

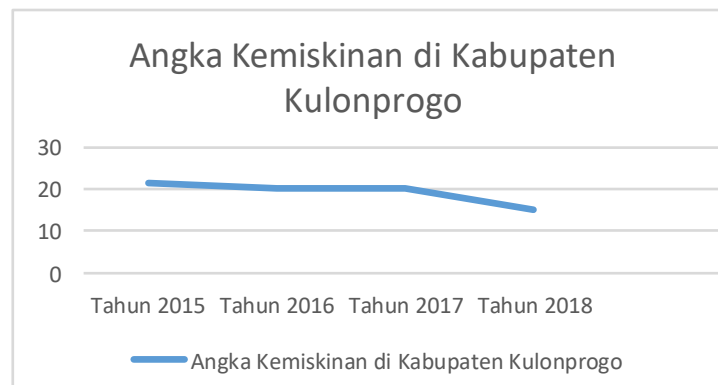
Adanya kebijakan ini mempunyai dampak yang positif hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya penjualan produk lokal. Hal ini bisa tercapai karena proses kebijakan Bela Beli Kulonprogo sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik dan juga dengan adanya komunikasi dan disposisi yang baik dalam menjalankan kebijakan Bela Beli itu sendiri (Asshofi, 2017). Tujuan utama dari pelaksanaan program ini sendiri adalah sebagai upaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Program ini memiliki semangat yang disebut dengan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang dirumuskan sedemikian rupa untuk mekanisme upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan sekaligus dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian

pertumbuhan ekonomi yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan gerakan sosial yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berlandaskan aspek pemberdayaan masyarakat dalam RPJMD. Awal konsep dari Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” sebenarnya untuk merebut pasar di negeri sendiri, maka berkenaan untuk mencapai tujuan mulia tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengikrarkan Bela Beli Kulon Progo guna memberi dukungan dan sekaligus sebagai tekad dan wujud keberpihakan dan pembelaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh komponen yang ada baik petani, pelaku UMKM, Koperasi, BUMD, Perusahaan, dan seluruh masyarakat Kulon Progo dengan memanfaatkan, menggunakan, mengkonsumsi, membeli, dan mengembangkan serta mencintai produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi lokal Kulon Progo. Pada bagian berikutnya dalam konteks regional dan nasional, gerakan ini dapat diterapkan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Negara dalam menghadapi system ekonomi kapitalis/pasar bebas.

Di samping hal-hal yang umum gerakan “Bela Beli Kulon Progo” juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa program Bela Beli Kulon Progo ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

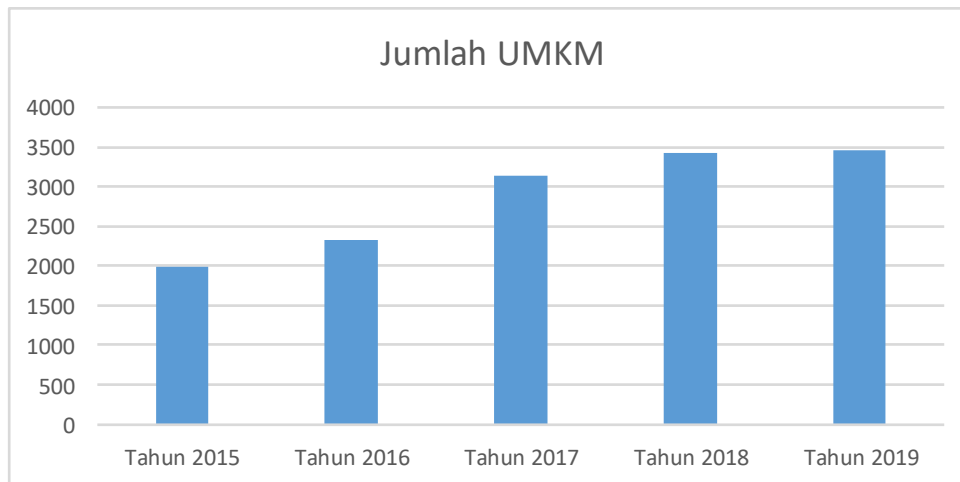
**Grafik 1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo**



Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2018

Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yang terus mengalami penurunan. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kemiskinan menunjukkan ada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan sebesar 5 % yaitu dari 20,03 % pada tahun 2017 menjadi 15,03 % pada tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Program Bela-Beli Kulon Progo selain menurunkan angka kemiskinan juga meningkatkan jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo setelah adanya program Bela-Beli Kulon Progo.

**Grafik. 2 Jumlah UMKM di Kabupaten Kulonprogo**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2019

Selain itu dengan adanya program Bela-beli Kulonprogo jumlah angka UMKM di Kabupaten Kulonprogo juga meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 pelaku usaha mikro mencapai 3000 unit. Berbeda jauh dengan tahun 2015, jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai angka 1000 unit. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo terus meningkat untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Bela-beli Kulon Progo. Maka dari itu hal ini menarik untuk di teliti dan dikaji mengenai kesuksesan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program Bela-Beli Kulon Progo.

## RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ini sendiri ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Penelitian kualitatif ini mengembangkan beragam metode yang saling terkait yang diharapkan dapat mengembangkan pemahaman atas pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam analisis data penelitian ini menggunakan metode NVivo 12 Plus. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam tentang Partisipasi masyarakat dalam gerakan Bela-beli Kulon Progo untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada pendeskripsian sebuah obyek masalah yang diteliti. Jadi bentuk dari hasil, laporan yang menggunakan metode kualitatif akan berbentuk narasi panjang. Dengan adanya penelitian menggunakan metode kualitatif proses temuan masalah akan lebih lengkap dan komprehensif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini juga menggunakan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi (Salim, 2006).

## RESULT AND DICUSSION

Pendekatan partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan (Sigiro, 2016). Partisipasi dalam konteks luas juga memiliki makna sebagai sebuah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan (Gunawan, 2018). Dari beberapa pendapat di atas dapat kita lihat bahwa, partisipasi masyarakat merupakan sebuah dasar modal utama pada setiap perencanaan kebijakan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sedikit program Pemerintah yang pada

pondasi awalnya melalui pola pendekatan partisipatif, namun dalam prakteknya bukan mengedepankan partisipasi dari masyarakat melainkan lebih kepada mobilisasi dan juga prosesnya bukan *bottom-up* tetapi *top down*.

Dalam hal ini pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo pada dasarnya merupakan suatu bentuk keprihatinan dari Pemerintah dikarenakan minimnya pendapatan masyarakat pada saat itu. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa pada masa sebelum adanya Program Bela Beli Kulon Progo UMKM di Kabupaten Kulon Progo khususnya para pengrajin batik hanya menjadi buruh dalam proses ekonomi di Yogyakarta dan sama sekali tidak memiliki daya saing yang kuat sebagai sebuah UMKM. Oleh sebab itu, Program Bela Beli Kulon Progo dicetuskan pada tahun 2012 pada awal masa periode Bapak Hasto Wardoyo guna mengatasi permasalahan tersebut

Tidak bisa dipungkiri memang peran UMKM harus memiliki daya saing guna menjadi sumber pendapatan daerah sehingga akan memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten tersebut. Untuk meningkatkan daya saing tersebut tentu dibutuhkan adanya keterkaitan antara masyarakat selaku pelaku langsung dalam proses ekonomi dan Pemerintah sebagai pelaku kedua dalam proses ekonomi. Sinergisitas antara masyarakat dan Pemerintah akan memberikan dampak yang positif khususnya pada peningkatan daya saing UMKM. Hal ini penting dikarenakan pada era seperti saat ini banyak masyarakat yang lebih cenderung membeli produk asing dibandingkan dengan produk lokal.

#### **A. Keaktifan Partisipasi**

Hal ini yang kemudian menjadi titik perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bawah masa jabatan Bapak Hasto Wardoyo. Dimana Bapak Hasto Wardoyo kemudian memberikan arahan semangat untuk mencintai produk lokal yang dihasilkan sendiri oleh Kabupaten Kulon Progo. Semangat ini yang kemudian dicetuskan oleh Bapak Hasto Wardoyo menjadi sebuah Program Bela Beli Kulon Progo. Tujuan utama dalam semangat tersebut tentu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui daya beli produk lokal serta untuk menghidupkan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Kulon Progo.

Semangat serta sikap nasionalisme yang tinggi terhadap suatu daerah memang akan memberikan rasa bangga terhadap suatu produk lokal yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dengan strategi tersebut rasa percaya dari masyarakat terhadap produk lokal akan semakin meningkat. Tentu dengan meningkatnya rasa tersebut masyarakat akan cenderung ingin membeli produk lokal juga semakin meningkat. Meskipun tidak bisa dilepaskan peran Pemerintah guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuat sebuah sinergitas yang baik dengan masyarakat.

Hal ini yang juga menjadi strategi Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap produk lokal Kabupaten Kulon Progo. Strategi tersebut dilakukan pada saat awal munculnya kebijakan Program Bela Beli Kulon Progo. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terjun secara langsung memberikan sosialisasi akan pentingnya mencintai sebuah produk lokal dan mengajak partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung Program Bela Beli Kulon Progo tersebut.

Dengan terus melakukan sosialisasi melalui slogan tersebut terbukti bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung Program Bela Beli Kulon Progo terus meningkat. Peningkatan keaktifan dari masyarakat juga memberikan dampak lain terhadap daya beli masyarakat di daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat kita lihat dari adanya suatu budaya baru dari masyarakat yang cenderung lebih memilih untuk membeli produk lokal UMKM sendiri dibandingkan produk lain

Tingkat partisipasi masyarakat guna meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya didukung melalui slogan untuk membeli produk lokal saja. Melainkan lebih jauh Pemerintah Daerah Kulon Progo juga memberikan suatu akses kemudahan bagi para UMKM untuk menjual barang hasil produknya. Melalui penggunaan TOMIRA (Toko Milik Rakyat) dimana keseluruhan produk yang dijual merupakan produk lokal hasil UMKM Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, tidak hanya kemudahan akses tempat untuk UMKM menjual berbagai produk yang dihasilkan. Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Koperasi juga tidak memberikan persyaratan yang sulit bagi UMKM menjual produk mereka di TOMIRA tersebut.

Hal ini tentu sangat memudahkan UMKM baru yang kemudian ingin menjual barang produk mereka. Hal ini berbeda dengan mekanisme penjualan produk sebelum adanya program Bela Beli Kulon Progo dimana untuk produk lokal yang akan masuk kedalam toko besar seperti Indomaret atau Alfamart mendapatkan seleksi yang ketat seperti dari sisi kemasan.

Jadi dapat dikatakan bahwa strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna meningkatkan daya saing produk lokal terbilang sangat efektif. Penggunaan slogan Bela Beli Kulon Progo yang saat ini dijadikan sebuah program sangat membantu meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap sebuah produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. Begitu juga dengan pemberian kemudahan akses kepada masyarakat untuk mampu menjual barang produk lokal mereka melalui TOMIRA juga terbilang sangat efektif bagi UMKM karena mampu menciptakan daya beli yang bagus bagi produk lokal tersebut.

Sehingga kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah para pengrajin serta pihak-pihak yang terlibat dalam UMKM mampu mendapat efek domino yakni berupa peningkatan kesejahteraan taraf hidup Partisipasi yang aktif dari masyarakat umum ataupun masyarakat yang terlibat dalam program Bela Beli Kulon Progo memang sangat terbantu dan didukung oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan karena fungsi dari Pemerintah itu sendiri merupakan penghubung untuk mensukseskan program suatu kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesuksesan jalannya suatu program sangat dipengaruhi dari aktifnya Pemerintah itu sendiri untuk mendukung masyarakat serta memberikan akses kemudahan untuk ikut berpartisipasi.

### ***B. Tanggungjawab Partisipasi***

Keterlibatan yang besar dari masyarakat memang menjadi komponen yang penting dalam mendukung suksesnya sebuah program yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Kulon Progo baik yang menjadi pelaku ekonomi UMKM ataupun pelaku ekonomi bisa saling bersinergi secara baik. Hal ini dikarenakan slogan program Bela Beli Kulon Progo tersebut memberikan dampak nyata akan peningkatan partisipasi masyarakat baik dari masyarakat ekonomi biasa ataupun masyarakat yang terlibat sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

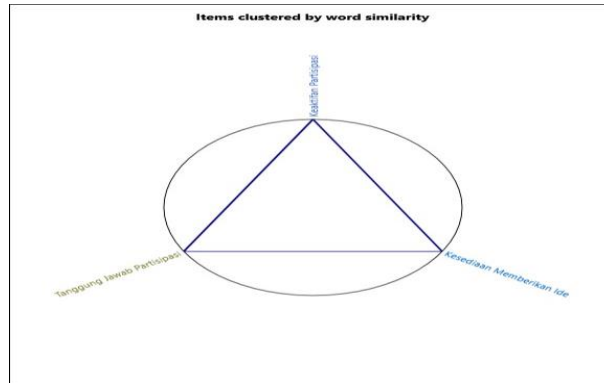
Selain itu partisipasi besar yang diberikan oleh masyarakat juga dapat dilihat dari daya beli masyarakat terhadap produk lokal yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang dijelaskan oleh beberapa ketua UMKM di atas dimana sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para UMKM tersebut. Artinya bahwa kemauan masyarakat untuk mampu mensukseskan program tersebut sangat besar Dengan memberikan strategi yang baik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah tersebut juga menjadi kunci utama Pemerintah dalam mensukseskan suatu program kebijakan. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo yang mengerti bahwa karakteristik masyarakat di daerah tersebut mayoritas merupakan masyarakat dengan daya beli rendah. Sehingga, dengan slogan mencintai produk lokal dan memberikan harga yang lebih terjangkau menjadikan TOMIRA primadona untuk masyarakat membeli berbagai produk UMKM dengan harga yang lebih terjangkau tetapi kualitas yang sama bagus. Dengan strategi tersebut maka Pemerintah Daerah Kulon Progo mendapat efek ganda dimana daya beli meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga pasti akan meningkat. Sehingga kesinambungan akan tanggung jawab jalannya sebuah program juga akan terus berlanjut.

### ***C. Kesiediaan Memberikan Ide***

Selain itu dari segi ide yang disumbangkan dapat dikatakan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sangat antusias ikut dalam berpartisipasi. Hal ini terbukti dari para pelaku UMKM yang terus memberikan inovasi baru terhadap produk lokal yang dihasilkan hingga produk yang tadinya hanya dipasarkan secara lokal saat ini beberapa produk justru sudah mencapai konteks internasional Suksesnya sebuah program memang tidak bisa berjalan hanya melibatkan satu aktor saja. Korelasi yang kuat antara aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut harus dilakukan guna menjamin keberlanjutan jalannya suatu program. Hal ini sangat bagus

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dimana telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk memberikan saran dalam suatu program kebijakan. Dengan proses pengambilan aspirasi yang baik tentu memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk mampu menciptakan sebuah program kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga sasaran dari sebuah program kebijakan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

**Gambar 1. Cluster Analysis Korelasi Faktor Partisipasi Masyarakat**



Sumber: Hasil Cluster Analysis Nvivo 12 di olah oleh peneliti 2020

Jadi dapat dikatakan bahwa ketiga aspek partisipasi masyarakat untuk mendukung program Bela Beli Kulon Progo memiliki keterkaitan masing-masing. Dimana dari ketiga faktor yang menjadi faktor pendorong partisipasi keaktifan memiliki kaitan erat dengan faktor tanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dari nilai korelasi mencapai 0,73. Selain itu faktor keaktifan juga memiliki korelasi yang tinggi dengan kesediaan memberikan ide. Hal ini dapat kita lihat dari nilai korelasi antar faktor tersebut yang mencapai 0,67.

**Tabel 1. Nilai Korelasi Faktor-Faktor dalam Partisipasi Masyarakat**

Code A	Code B	Pearson correlation coefficient
<b>Tanggung Jawab Partisipasi</b>	Keaktifan Partisipasi	0.734155
<b>Kesediaan Memberikan Ide</b>	Keaktifan Partisipasi	0.675876
<b>Tanggung Jawab Partisipasi</b>	Kesediaan Memberikan Ide	0.406093

Sumber: hasil cluster analysis Nvivo 12 di olah oleh peneliti 2020

Ketiga factor ini memang memiliki kaitaran yang sangat erat, hal ini dapat dilihat dari segi keaktifan masyarakat yang akhirnya menjadikan sebuah budaya baru untuk lebih mencintai produk lokal di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dari segi sumbangsih ide dan gagasan masyarakat Kabupaten Kulon Progo juga ikut turut berpartisipasi melalui pengembangan ide-ide inovasi dari produk lokal baru yang dikembangkan oleh UMKM. Terkait partisipasi dalam segi tanggung jawab program tidak hanya masyarakat melalui daya beli produk yang tinggi, tetapi pemerintah juga ikut terlibat dengan memberikan akses kemudahan baik dari segi tempat penjualan produk melelalui TOMIRA serta memberikan persyaratan yang mudah untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo untuk menjual produknya di TOMIRA.

**Faktor-Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo**

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Pemerintah juga selaku pihak yang mendukung jalannya sebuah kebijakan atau program.

Dimana sinergitas dari kedua pihak sangat dibutuhkan guna meningkatkan berjalannya partisipasi yang baik. Selain dari faktor pelaku utama tersebut, dalam hal ini tentu terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah partisipasi baik secara eksternal ataupun internal. Adanya faktor tersebut tentu dapat dilihat dari segi faktor eksternal dan faktor internal. Secara internal tentu faktor utama yang menjadi kunci adalah peran masyarakat UMKM dan Pemerintah Daerah itu sendiri dimana keduanya harus saling memberikan ruang kemudahan untuk berpartisipasi sedangkan masyarakat juga harus memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa tingkat daya beli dari masyarakat tersebut yang tentunya bergantung pada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut

Dalam konteks program kebijakan, Pemerintah tidak bisa hanya melihat dari proses pembuatan kebijakannya saja. Sehingga keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela yang berasal dari dalam ataupun luar dalam proses keseluruhan kegiatan yang bersangkutan harus dijaga dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang atas pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut akan memberikan implikasi yang berbeda. Oleh sebab itu, melakukan analisis yang matang terhadap hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif dan cara bagaimana komunitas sasaran mendapatkan manfaat dari proses kebijakan tersebut menjadi satu hal yang penting.

#### **A. Kesempatan Partisipasi**

Memang faktor internal menjadi faktor yang paling fundamental dalam hal ini karena langsung bersinggungan dengan program Bela Beli Kulon Progo. Dalam hal ini dilihat dari faktor internal tentu Pemerintah Daerah Kulon Progo sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dimana kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung para pelaku UMKM untuk dapat ikut berpartisipasi. Begitu juga kepada masyarakat umum yang mana mendapatkan kesempatan kemudahan yang sama untuk menjangkau produk lokal tersebut. Melalui pengadaan TOMIRA ini menjadi suatu kebijakan yang sangat efektif untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum atau UMKM untuk mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo tersebut.

Dalam hal ekonomi tidak bisa dipungkiri bahwa faktor penghambat utama tidak suksesnya sebuah produk bisa dikarenakan distribusi yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga konsumen tidak mampu menjangkau suatu produk. Arti makna menjangkau dalam hal ini tidak hanya pada persepektif harga melainkan juga lokasi distribusi dari sebuah produk tersebut. Sehingga infrastruktur yang mendukung agar berjalannya distribusi secara baik harus dibuat dengan sangat baik. Seperti pemberian toko pada titik-titik strategis sebuah kota. Pernyataan tersebut juga senada dengan pelaku UMKM Gula Semut di Kabupaten Kulon Progo yang mengatakan bahwa dengan adanya TOMIRA omset penjualan terus meningkat. Bahkan dari tahun ke tahun omset penjualan bisa mencapai 100 bungkus gula semut.

Distribusi yang baik dari sebuah produk memang sangat membantu para pelaku ekonomi untuk dengan mudah menjual produk mereka. Hal ini yang disadari oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo dimana mendirikan berbagai toko TOMIRA pada berbagai titik strategis di Kabupaten Kulon Progo. Keterjangkauan yang mudah untuk masyarakat menjadi kunci utama suatu produk akan memiliki daya saing tinggi. Sesuai dengan konsep ekonomi dimana distribusi dan daya beli menjadi faktor pendukung suksesnya sebuah kegiatan ekonomi.

Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk bergabung dan menjual produk mereka di TOMIRA. Bahkan syarat yang diberikan sangat mudah bagi UMKM tersebut untuk bergabung. Mereka hanya perlu membawa surat daftar izin edar dari Dinas Kesehatan lalu UMKM yang sudah terdaftar hanya tinggal memberikan produk mereka kepada Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo. Kemudian Dinas UMKM akan memberikan saran dan masukan terhadap produk tersebut seperti misalkan dari segi kemasan untuk lebih menjual produk tersebut. Setelah itu, pihak UMKM dapat mengisi formulir berupa jenis produk dan kesanggupan untuk memproduksi jumlah produk tersebut. Setelah proses tersebut selesai produk tersebut akan langsung masuk dalam TOMIRA.



### **B. Kemauan Partisipasi**

Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memang sangat efektif membantu para pelaku UMKM dan masyarakat umum untuk dapat membeli produk lokal tersebut. Selain kemudahan tersebut harga yang lebih terjangkau dari produk lokal juga menjadi faktor lain masyarakat di Kabupaten Kulon Progo membeli produk lokal yang disediakan di TOMIRA. Memang Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan strategi khusus dengan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih ingin turut serta membeli produk lokal tersebut Dengan strategi harga yang lebih terjangkau tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi faktor eksternal itu sendiri yakni daya beli masyarakat umum di Kabupaten Kulon Progo tersebut. Faktor kemampuan masyarakat untuk mampu membeli produk lokal tersebut memang juga memiliki peran yang penting dalam hal mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo tersebut

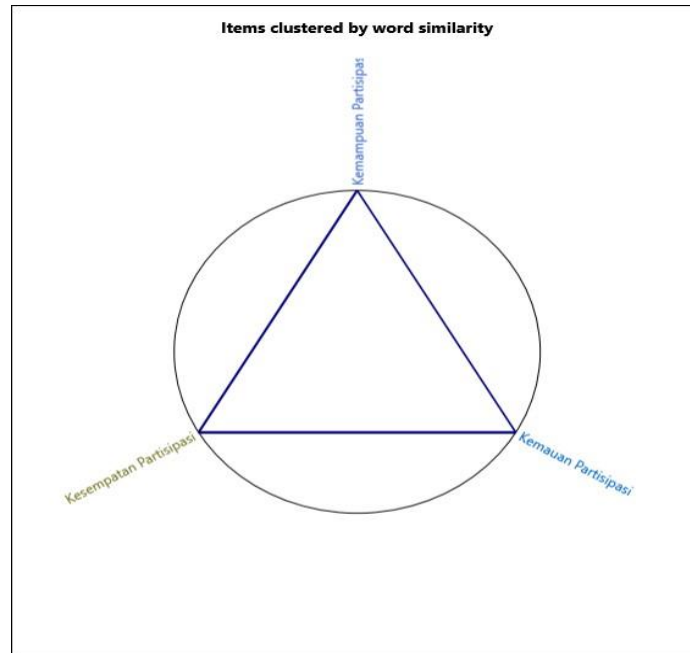
Masyarakat yang aktif memang menjadi kunci sukses terwujudnya capaian sebuah program. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peran semua aktor terlibat sangat dibutuhkan dalam suksesnya sebuah program kebijakan. Dalam proses ekonomi harga juga menjadi satu faktor utama untuk mendukung kemauan masyarakat membeli sebuah produk. Meskipun dari segi kualitas harus tetap bagus. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dimana memberikan strategi harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini yang kemudian menjadikan daya beli atau kemauan masyarakat cenderung lebih memilih produk lokal, Disamping adanya tetap menjaga kualitas yang baik dari produk lokal tersebut.

### **C. Kemampuan Partisipasi**

Kemampuan partisipasi menjadi faktor kedua yang sangat berpengaruh dalam mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo setelah adanya kesempatan partisipasi. Kemampuan ini sangat dekat dengan daya beli masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sendiri. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan karena memang program Bela Beli Kulon Progo itu sendiri harus melibatkan masyarakat secara umum karena dengan slogan yakni Bela Kulon Progo maka Beli Kulon Progo maka dukungan dari daya beli masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memang selalu memberikan dukungan besar untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo ikut aktif berpartisipasi dalam hal program Bela Beli Kulon Progo. Bahkan dalam hal ini terkait pembuatan keputusan yang akan dilakukan juga selalu melibatkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Hal ini yang menjadi salah satu faktor sukses juga dalam terus berkembangnya UMKM di Kabupaten Kulon Progo Selain itu guna memberikan ruang kepada UMKM memperluas pangsa pasar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga selalu memberikan andil kepada UMKM unggulan seperti Gula Semut, Batik, dan Mr. Tello untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini biasanya dilakukan melalui program bazaar atau festival yang sering diadakan bahkan tidak hanya konteks lokal Kabupaten Kulon Progo melainkan juga bazaar dan festival di luar Kabupaten Kulon Progo. Untuk bazaar besar di konteks lokal para UMKM biasanya diikuti dalam acara Gebyar UMKM.

Pelaksanaan partisipasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan sudah sangat baik. Bahkan sinergitas antara masyarakat umum, para UMKM, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung suksesnya program Bela Beli Kulon Progo. Artinya faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari segi faktor lain seperti kesempatan dari masyarakat, kemampuan dari masyarakat, serta kemauan dari masyarakat ketiganya memiliki pengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo hingga saat ini.

**Gambar 2: Cluster Analisis Faktor Yang Paling Mempengaruhi Partisipasi**



Sumber: hasil dari cluster Analisis Nvivi 12 di olah oleh peneliti 2020

Dari ketiga faktor tersebut faktor kesempatan memegang peran yang sangat fundamental dalam suksesnya pelaksanaan program Bela Beli Kulon Progo. Dari hasil cluster analisis yang dilakukan melalui aplikasi NVivo 12 dapat kita lihat bahwa kesempatan memiliki korelasi yang tinggi dan mempengaruhi faktor kemauan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program Bela Beli Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan nilai korelasi Kesempatan Partisipasi mencapai 0,88.

Hal ini tidak terlepas dari kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui ajakan para UMKM untuk ikut andil bagian dalam bazaar baik lokal ataupun konteks nasional. Selain itu melalui program TOMIRA juga memberikan kesempatan besar bagi masyarakat dan para UMKM untuk ikut serta dalam mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo. Hal ini dikarenakan TOMIRA menjadi titik temu antara produsen dan konsumen dalam program Bela Beli Kulon Progo.

Faktor kesempatan ini juga memiliki andil bagian yang besar dalam memberikan dampak lain terhadap faktor kemauan dan kemampuan dari para UMKM dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat kita lihat dari nilai korelasi yang tinggi antara keduanya dengan mencapai nilai 0,88. Bahkan untuk nilai korelasi antara kesempatan dan kemampuan mencapai 0,85. Artinya bahwa nilai korelasi antar faktor tersebut tinggi karena hamper mendekati nilai 1.

**Tabel 2. Nilai Korelasi Keseluruhan Faktor Dalam Mempengaruhi Partisipasi di Kabupaten Kulon Progo**

Code A	Code B	Pearson correlation coefficient
<b>Kemauan Partisipasi</b>	Kesempatan Partisipasi	0.88226
<b>Kemampuan Partisipasi</b>	Kesempatan Partisipasi	0.855811
<b>Kesempatan Partisipasi</b>	Kemauan Partisipasi	0.807423
<b>Kemampuan Partisipasi</b>	Keaktifan Partisipasi	0.805822

Sumber: hasil dari cluster Analisis Nvivo 12 di olah oleh peneliti 2020

Dengan adanya distribusi produk yang baik menjadikan UMKM mampu menjual produk lokal mereka melampaui omset yang diargetkan. Sehingga memberikan dampak besar terhadap kemampuan dari UMKM tersebut untuk lebih berdaya saing. Kemampuan lain terkait inovasi juga terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo seperti adanya pengembangan produk inovasi dan ide-ide gagasan yang baru dari produk lokal tersebut.

Selain itu dengan adanya sosialisasi terkait slogan dalam setiap acara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga menjadikan faktor kemauan untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut terus meningkat. Dapat dilihat dari terus berkembangnya para produsen UMKM dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2019 UMKM di Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 60.853.578 ribu dengan pangsa pasar mencapai 98,71% hal ini disampaikan oleh kepala bagian pemodalan Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo, Kemudahan syarat untuk menjajakan produk lokal UMKM di TOMIRA juga menjadi aspek penentu yang besar bagi para pelaku industri UMKM untuk ikut terjun mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo.

## CONCLUSION

Suksesnya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah memang bukan suatu hal yang mudah. Artinya dibutuhkan sebuah sinergitas yang besar tidak hanya didasarkan pada Pemerintah Daerah selaku pembuat sebuah kebijakan dalam konteks Daerah. Melainkan juga diperlukan sebuah sinergitas yang baik antara masyarakat sebagai pelaku langsung yang akan bertanggung secara langsung dengan sebuah kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah. Ketiga aspek partisipasi masyarakat untuk mendukung program Bela Beli Kulon Progo sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi kemauan masyarakat yang akhirnya menjadikan sebuah budaya baru untuk lebih mencintai produk lokal di Kabupaten Kulon Progo. Keaktifan menjadi faktor paling berpengaruh dibandingkan faktor yang lain, hal ini dapat dilihat dari dengan nilai koefisien keaktifan yang mencapai 0,73. Dari ketiga faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut faktor kesempatan memegang peran yang sangat fundamental dalam suksesnya pelaksanaan program Bela Beli Kulon Progo. Dari hasil cluster analisis yang dilakukan melalui aplikasi NVivo 12 dapat kita lihat bahwa kesempatan memiliki korelasi yang tinggi dan mempengaruhi faktor kemauan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program Bela Beli Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan nilai korelasi Kesempatan Partisipasi mencapai 0,88.

## ACKNOWLEDGEMENT

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta jajaran yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu saya ucapkan terima kasih juga buat pelaku UMKM serta pengelola Toko Milik Rakyat (TOMIRA) yang telah banyak memberikan informasi mengenai kesuksesan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

## REFERENCE

- Corynta, I. (2011). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal of Accounting and Investment*. 12(2).
- Gunawan, G. (2018). Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Sabu Rai) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 4(1), 39-46.

- Kurniati, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(4).
- Mustanir, Ah. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JCG : Jurnal Clean Government*. 2(1).
- Sigiro, B. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran Dan Komitmen Perumus Kebijakan Terhadap Responsivitas Anggaran. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 12(1), 26-38.
- Uceng, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 5(2).
- Nurmanaf, A. R. (2003). Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(2), 13.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif edisi kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Asshofi, M.K. (2017). Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 6(1), 41-83.